

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan secara umum dapat diartikan sebagai kondisi terbatasnya uang, menurunnya penghasilan dan belum terpenuhinya kebutuhan pokok. Walaupun sejatinya, kemiskinan merupakan persoalan rumit, dari sisi faktor penyebab ataupun akibat yang muncul. Kemiskinan menyebabkan jutaan anak tidak dapat memperoleh pendidikan yang bermutu, sulitnya pembayaran kesehatan, minimnya kesempatan memperoleh pelayanan umum, minimnya kesempatan kerja, minimnya jaminan masyarakat & keamanan pada keluarga & terlebih lagi kemiskinan membuat rakyat miskin kesulitan memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Menurut *World Bank* (2011), kemiskinan adalah persoalan rumit yang mendapatkan sedikit kemajuan. Kesulitan Indonesia guna mengatasi kemiskinan sangat beraneka ragam. Berawal dari minimnya kebutuhan dasar sampai minimnya ketrampilan rakyat miskin, guna memberdayakan kelompoknya sendiri. Rakyat miskin tidak mempunyai banyak pilihan, dalam penentuan cara paling baik supaya bisa keluar dari jerat kemiskinan. Bank Dunia memakai 2 ciri pada penentuan garis kemiskinan. 1) Memakai garis kemiskinan nasional yang dilandaskan menggunakan bentuk konsumsi 2.100 kalori per hari. 2) Garis kemiskinan internasional dilandaskan pada PPP US\$1 & US\$2 (Dimas, 2016:5). *World Bank* memakai dua-duanya, bagi tujuan analisis berbeda.

Kajian kemiskinan sudah ada dari dulu, meskipun sudah dilaksanakan banyak usaha pada penanggulangannya, namun hingga kini masih ada 1,2 milyar

warga dunia hidup melalui penghasilan kurang dari 1\$ & lebih dari 2,8 milyar warga dunia, hanya memiliki penghasilan kurang dari 2\$ (Wongdesmiwati, 2009:1). Rakyat hidup dengan penghasilan *riil minimum* internasional. Bagi Indonesia, persoalan kemiskinan merupakan persoalan urgent untuk usaha membangun bangsa.

Warga golongan miskin merupakan “golongan residual”, yaitu komunitas warga yang belum tergapai kebijakan publik yang terfokus spesifik. Kelompok ini masuk pada golongan rumit dicapai, karena minimnya SDM bermutu sehingga minim pemanfaatan sarana & prasarana, di antaranya faktor produksi. Warga juga minim ketrampilan, kualitas pendidikan minim, terbatasnya pelatihan kerja, di antaranya melalui pemanfaatan bantuan bagi kebutuhan pokok manusia & jaminan hukum yang belum mendukung rakyat kelompok miskin (Rini, 2018:4).

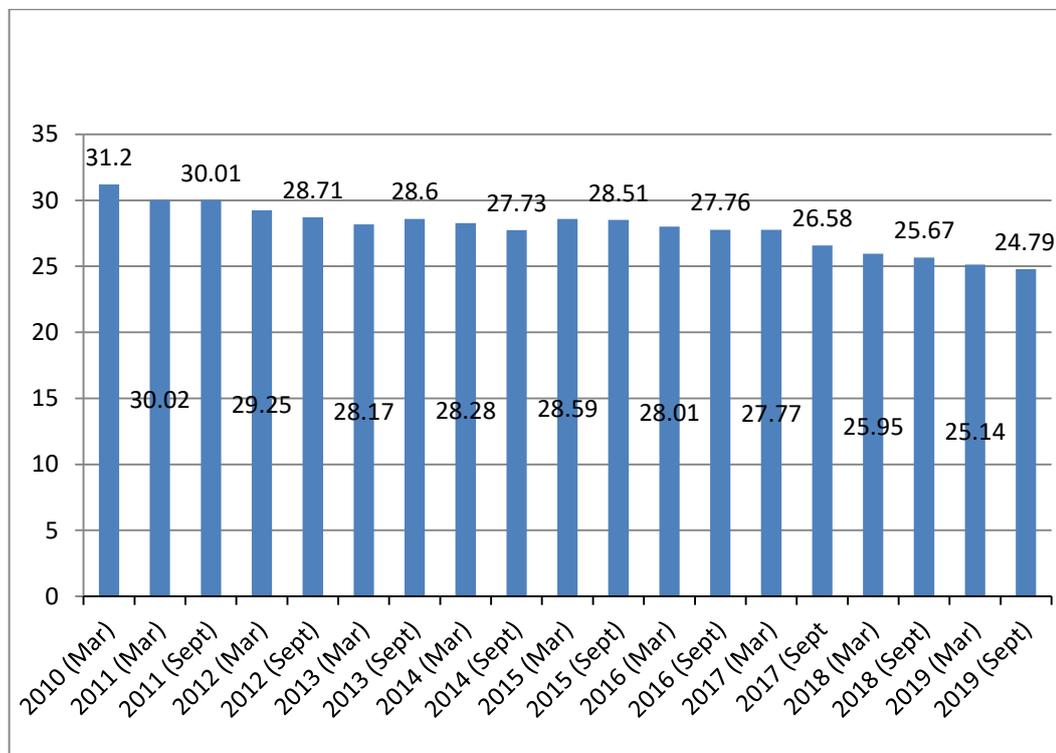
Pemerintah nasional & daerah sudah berusaha guna melakukan semua kebijakan penanganan kemiskinan, namun masih belum mampu mengatasi pokok persoalan. Besarnya akibat buruk yang ditimbulkan kemiskinan, selain memunculkan persoalan masyarakat, kemiskinan bisa berpengaruh pada perkembangan ekonomi bangsa. Angka kemiskinan yang besar akan menimbulkan anggaran besar yang harus dikeluarkan, dalam melaksanakan pembangunan ekonomi jadi lebih maju sehingga akan membatasi perkembangan ekonomi.

Kemiskinan dicirikan besarnya rasio ketergantungan, serta banyaknya anggota keluarga & di antaranya masih balita. Hal ini mempengaruhi pada minimnya konsumsi, yang menghambat tingkat kepandaian mereka sehingga kompetensi meraih akses kesempatan dalam masyarakat, anak golongan miskin ada

pada kelompok lemah. Buruknya, kemiskinan terjadi dari kebiasaan yang diturunkan antar generasi. Budaya kemiskinan yang diturunkan ini, cenderung membatasi dorongan guna melaksanakan pergerakan, yaitu membatasi kemajuan & harapan rakyat di masa mendatang.

Gambar 1. 1.

Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Periode 2010-2019



Sumber : Berita Resmi Statistik, 2019

*Keterangan: Menurut Menteri Keuangan memaparkan bahwa pemerintah menggambarkan akan terdapat kenaikan warga miskin sebesar 1,89 juta jiwa & jumlah pengangguran baru meningkat 2,92 juta.

Gunawan Sumodiningrat (Indra, 2013:28), menggolongkan penyebab kemiskinan pada dua tipe. 1) kemiskinan disebabkan karena faktor dari luar

kemampuan individu. Faktor ini secara nyata, lebih berciri menghambat lembaga dan struktur yang pasti membatasi seseorang, dalam mencapai peluangnya. Kemiskinan ciri ini dikenal sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang dialami oleh kelompok masyarakat, karena struktur masyarakat itu belum bisa memakai sumber penghasilan yang sejatinya ada bagi rakyat. 2) kemiskinan yang dikarenakan, oleh faktor dari dalam diri sendiri. Kelompok lama yang menganut pemikiran ini melihat, kemiskinan ciri ini ada sebagai dampak dari nilai & budaya yang diikuti kelompok masyarakat.

Individu miskin karena tidak bisa kerja keras, tidak hemat, belum memiliki rencana, minimnya jiwa usaha, belum adanya keinginan meraih prestasi & lain-lain. Kelompok miskin merupakan grup masyarakat yang memiliki budaya khusus. Budaya tersebut, digambarkan oleh Oscar Lewis sebagai penemu teori ini, adalah "budaya kemiskinan" (*culture of poverty*). Warga Kota Semarang mendapati kemiskinan, meskipun angkanya terbatas. Warga miskin Kota Semarang menurut perhitungan PPLS, merupakan paling bawah di Jawa Tengah. Selain itu, warga miskin Semarang masuk pada skala 3 yang ada di bawah garis kemiskinan / pas digaris kemiskinan.

Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah, mempunyai banyak potensi penting yang menyebabkan angka warga miskin paling rendah. Infrastruktur yang memungkinkan, kesempatan kerja yang luas, banyaknya jumlah perusahaan, jumlah (APBD) yang berpotensi terjadi (Indra, 2018:28).

Indonesia merupakan negara yang mengalami masalah kemiskinan urgent, bentuk kemiskinan tersebut antara lain di Semarang. Kota Semarang di tahun 2019

termasuk pada golongan miskin sejumlah 71969 jiwa di Semarang, jumlah tersebut telah melewati pengecekan & identifikasi Pemerintah Kota Semarang di tahun 2018. Angka itu, masuk pada kelompok mendekati miskin.

Kenyataan tentang jumlah kemiskinan, adanya keinginan kuat berasal dari Pemerintah Semarang dalam membentuk Kota Semarang yang adil dan sama, melaksanakan perubahan adalah dorongan pookok, untuk membahagiakan rakyat maka kegiatan utama dari sapta program yaitu penanganan kemiskinan. Pemerintah Kota Semarang membentuk sebuah kebijakan, guna mengimplementasikan tingginya jumlah kemiskinan.

Pembangunan taktik & program pengentasan kemiskinan yang baik program, sesuai target & sesuai guna dengan profil, kebutuhan, karakter & kemungkinan penduduk miskin. Pemerintah belum bisa mengatasi sendiri tanpa sokongan peran dari seluruh stakeholder antara lain swasta, pelaksana usaha, PTN, LSM & masyarakat.

Pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan negara, meskipun dibutuhkan partisipasi warga untuk membuat solusi sesuai target & keikutsertaan. Keikutsertaan dimaknai keikutsertaan rakyat, negara, wilayah & seluruh *stakeholder*, yang berada pada implementasi pembangunan. Kontribusi rakyat urgent dilaksanakan pada pelaksanaan pembangunan sebagai penanganan kemiskinan, dimulai dari perencanaan, pembuatan kebijakan, implementasi, serta penggunaan hasil. Hal ini ditunjukkan supaya rakyat mempunyai rasa memiliki, dapat aktif secara ikhlas jika rakyat diajak sejak dini pada pelaksanaan

pembangunan, apalagi Indonesia merupakan negara berkembang dengan potensi rakyat miskin yang cukup banyak.

Berdasarkan UU No 15 Tahun 2010, mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dipaparkan Penanggulangan Kemiskinan, merupakan kebijakan negara & pemerintah wilayah yang dilaksanakan melalui terstruktur, terarah & berseragam pada dimensi usaha & rakyat guna meminimalisir angka warga miskin, guna menambah tingkat kebahagiaan rakyat. Kebijakan pengentasan kemiskinan merupakan aktivitas yang dilaksanakan negara, pemerintah wilayah, dimensi usaha & rakyat guna penambahan kebahagiaan rakyat miskin dengan bantuan masyarakat, kesejahteraan rakyat, peningkatan usaha UMKM & kebijakan lain guna penambahan aktivitas keuangan. Peningkatan kebahagiaan kemiskinan, dilakukan melalui penyusunan program & keputusan yang berorientasi menyeragamkan aktivitas penanganan kemiskinan, pada beberapa kementerian atau instansi & pelaksanaan kontrol & pengendalian dari pembangunan.

Pemerintah Semarang guna penanganan kemiskinan ini, telah berusaha supaya bisa mengurangi jumlah kemiskinan di Semarang yang besar, melalui pengurangan jumlah kemiskinan 1% per tahun. Derajat kemiskinan di Semarang ketika diposisi angka 3,98 %, segala usaha dilaksanakan Pemerintah Semarang, guna pengentasan kemiskinan dengan pemberian beberapa bantuan masyarakat. Pemberian bantuan supaya sesuai target, negara melakukan penempelan stiker pada masing-masing rumah warga yang masuk kelompok belum mampu /sering dikenal sebagai (KPM).

Usaha penanganan kemiskinan di Semarang dilakukan negara dengan pengeluaran, Perda Semarang No. 12 tahun 2016 mengenai Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang yang berorientasi, peningkatan kemampuan & pengembangan ketrampilan pokok & ketrampilan usaha penduduk miskin; meningkatkan kontribusi penduduk miskin, pada proses pengambilan keputusan umum yang memperkuat jaminan penghargaan, keamanan & memenuhi kebutuhan dasar; perwujudan keadaan & kondisi keuangan, politik & masyarakat dengan kemungkinan penduduk miskin bisa mendapatkan peluang sebesar-besarnya, dengan memenuhi kebutuhan pokok & penambahan kualitas hidup secara kontinu & pemberian perasaan aman, pada golongan penduduk miskin & rawan akan kemiskinan.

Tabel 1. 1.

Angka Warga Miskin Semarang Tahun 2013-2020

Kota Semarang	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)							
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Kota Semarang	79580	71969	73650	80860	83590	84270	84640	86734

Sumber : BPS Kota Semarang, 2020

Data tersebut dapat dilihat, bahwa angka kemiskinan Kota Semarang masih tinggi meski sudah menurun dari tahun sebelumnya, problem kemiskinan & *job less* adalah urusan rumit & terasa mustahil apabila dilakukan pemerintah daerah. Kebutuhan sokongan, kerjasama & harmonitas pada seluruh pemangku kepentingan & bagian masyarakat, dimulai dari PTN, LSM, Tomas & ranah usaha. Pemerintah Semarang mempunyai kebijakan penanganan kemiskinan dengan

kebijakan “GERBANG HEBAT”, yaitu Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem, Etos Bersama Masyarakat.

Kebijakan ini dapat berlangsung melalui 4 rencana yang berada pada 4 golongan, yaitu penanganan kemiskinan berdasarkan bantuan sosial, pengembangan sosial, penyelenggaraan UMKM & pengembangan program yang mendukung rakyat. 4 golongan itu, rencananya dijalankan OPD teknis berdasarkan pada aspek pengetahuan & TUPOKSI. Gerbang Hebat adalah kebijakan penanganan kemiskinan & belum adanya pekerjaan bagi penduduk Semarang.

Berdasarkan 4 rencana upaya pengentasan kemiskinan dalam implementasi Program Gerbang Hebat di Kampung Batik, Rejomulyo Semarang. Peneliti akan lebih memfokuskan pada kinerja Program Gerbang Hebat dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial. Pemerintah Kota Semarang dengan Programnya Gerbang Hebat telah berupaya dalam mengentaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial sebesar Rp. 200.000.000 kepada warga di Kampung Batik, Rejomulyo Semarang Timur. Bantuan tersebut diberikan Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2016 dengan harapan melalui bantuan tersebut warga Kampung Batik dapat mengentaskan kemiskinan di Kampung Batik. Melalui bantuan sosial diharapkan warga Kampung Batik, dapat mengembangkan daerahnya, dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk batik milik warga Kampung Batik, Rejomulyo Semarang Timur.

Dalam upaya menghidupkan kembali industri batik yang ada di kawasan Kampung Batik Rejomulyo, Pemerintah Kota Semarang menjadikan kampung

batik sebagai kampung tematik. Guna mendukung upaya tersebut, Pemerintah Kota Semarang memberikan dana stimulus sebesar Rp. 200.000.000 sejak tahun 2016 (Rahman, 2019).

Pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengentaskan kemiskinan di Kampung Batik, tidak dalam bentuk uang tunai. Pemberian bantuan sosial ini berwujud fisik berupa pembuatan sarana dan prasarana untuk membangun Kampung Batik sebagai kampung wisata di Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang berupaya menjadikan Kampung Batik sebagai kampung wisata yang indah dan rapi melalui bantuan dana sebesar Rp.200.000.000 hal ini sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan di kawasan kampung batik. Pemberian bantuan dana telah menjadikan Kampung Batik sebagai kampung idaman yang bersih, hijau, rapi, dan mandiri yang bernama Kampung Batik, Rejomulyo Semarang Timur (Susanto, 2017).

1.2. Identifikasi Masalah

1. Promosi kurang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah untuk memajukan kampung tematik tersebut.
2. Pembenahan masih diperlukan terhadap masyarakat karena belum produktif untuk memajukan kampung tersebut.

1.3. Perumusan Masalah

1. Apakah implementasi Program Gerbang Hebat di Kampung Batik, Rejomulyo sudah tepat ?

2. Apa hal-hal yang mendukung dan menghambat implementasi Program Gerbang Hebat di Kampung Batik, Rejomulyo?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis ketepatan implementasi Program Gerbang Hebat di Kampung Batik, Rejomulyo
2. Mengetahui hal-hal yang mendukung dan menghambat implementasi Program Gerbang Hebat di Kampung Batik, Rejomulyo

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Riset ini bisa jadi materi referensi & menunjang pada pembangunan ilmu & pembagian ide, bagi implementasi penanganan kemiskinan di Semarang dengan kebijakan kampung batik.

2. Manfaat praktis,

- a. Peneliti berharap supaya dapat menyumbangkan pengetahuan mengenai kebijakan Kampung Tematik & meningkatkan pengalaman untuk melaksanakan riset.
- b. PTN supaya menjadi materi rujukan & pengetahuan tentang implementasi program guna mengatasi kemiskinan.
- c. Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan tentang implementasi kebijakan Kampung Tematik di Semarang supaya cocok orientasi targetnya & tidak terjadi disfungsi oleh petugas.
- d. Warga menyampaikan pengetahuan mengenai implementasi kebijakan kampung tematik guna menangani kemiskinan.

1.6. Kajian Teori

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Posisi Peneliti
1	Sarwono.2016. Judul “Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Kemiskinan dengan KUR MIKRO PT. BRI cabang Soekarno-Hatta Malang”.	Perpres No. 15 Tahun 2010 mengenai peningkatan penanganan kemiskinan, jadi program yang spesifik, mengelola mengenai peningkatan penanganan kemiskinan yang juga terdiri dari program penyumbangan KPR untuk stakeholder di Indonesia. Riset ini untuk kajian spesifik pada PT. BRI Unit Soekarno-Hatta di Malang. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif	Riset ini menampilkan, bahwa kerja PT. BRI Unit Soekarno - Hatta untuk pelaksanaan program KUR, dilihat dari bidang substansi & lingkungan program menampilkan isi bagus. Faktor pendukung yaitu ciri PT. BRI Persero Tbk adalah ahli pada aspek perbankan. Problemanya yaitu terbatasnya PT. BRI Persero Tbk guna melaksanakan kegiatan MONEV pada pengurangan kemiskinan sesuai dengan tujuan, dari Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010. Kebijakan KUR Mikro, membawa dampak baik pada laju ekonomi dan upaya UMKM.	Penelitian oleh Buyung Adi, dkk melihat kesuksesan pelaksanaan menurut Grindle (1980) yang dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (<i>content of policy</i>) dan lingkungan implementasi (<i>context of implementation</i>). Posisi peneliti dalam penelitian ini, terletak pada penggunaan teori dari Matland yakni Ketepatan Pelaksanaan Implementor. Dengan teori ini, peneliti mengetahui tujuan dan upaya yang akan dicapai oleh

No	Peneliti/Judul	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Posisi Peneliti
			PT. BRI dalam pendistribusian KUR kredit melalui sasaran yang besar, dapat menambah potensi adanya ketidakuntungan dari hadirnya pinjaman yang terhenti maka guna mengurangnya pengajuan pinjaman wajib dikaji oleh institusi perbankan yang sudah ahli.	implementor.
2.	Silitonga. 2017. "Judul Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi guna mengurangi Kemiskinan pada Rakyat".	Riset ini memiliki orientasi, memahami penggolongan guna menunjukkan orientasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, berdasarkan kebutuhan wilayah pada Kabupaten Bekasi. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif.	Riset memperlihatkan dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bekasi dituliskan pada beberapa macam kebijakan yang dilakukan oleh petinggi OPD yang terlibat didalamnya, peneliti mengintisarikan bahwa kebijakan unggulan yang dinilai mempunyai kontribusi tinggi yakni kebijakan infrastuktur pda Rutilahu & kebijakan	Riset Romaully memakai pelaksanaan memakai, konsep George Edward III berfokus di 4 persoalan supaya pelaksanaan jadi ampuh. Keberadaan peneliti pada riset ini, berada di pemakaian konsep dari Matland yaitu Kesesuaian Implementor.

No	Peneliti/Judul	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Posisi Peneliti
			<p>pengembangan masyarakat pada KUM. Pada implementasinya, Pemerintah Bekasi mempunyai mutu & pendukung yang bagus dari sisi pelaksana ataupun SDA & keuangan daerah. Faktor hambatan muncul antaralain berasal dari warga, serta belum detailnya kebijakan, implementasi & penilaian penanganan kemiskinan pada Perda yang berisi inti besar orientasi penanggulangan kemiskina & hadirnya hanya ditinggalkan pada regulasi pengadaan kemakmuran masyarakat, tidak samanya data penduduk miskin diantara OPD yang menimbulkan hadirnya salah tujuan kebijakan yang berlangsung.</p>	
3.	Herwina.2018.Judul “Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Tanjung Pinang pada Penanganan	Menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah Tanjungpinang guna menanggulangi Kemiskinan.	Dalam riset ini dapat dilihat bahwa, pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Tanjungpinang guna menanggulangi kemiskinan telah berlangsung bagus, meskipun ditemukan rintangan terkait	Herwina menunjukkan bahwa analisis pelaksanaan oleh Edward III menggunakan 4 persoalan supaya pelaksanaan jadi efektif, sementara letak researcher dalam riset ini, berada dengan menggunakan konsep

No	Peneliti/Judul	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Posisi Peneliti
	Kemiskinan.	Riset ini, peneliti memakai macam riset kualitatif & narasumber sebanyak 5 individu.	implementasi di dunia nyata. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Tanjungpinang, jika bentuk relasi yang berlangsung diantara oknum belum baik sehingga akan berdampak bagi kesuksesan program penanggulangan kemiskinan di Tanjungpinang.	Matland.
4.	Setijaningrum. 2017. Judul “Program Terintegrasi Guna Menanggulangi Kemiskinan di Surabaya”.	Memahami program yang terintegrasi dalam menanggulangi kemiskinan yang tepat untuk golongan lemah di Surabaya menurut skala kebutuhan mereka agar bisa hidup nyaman. Tipe riset yang dipakai yaitu pendekatan kualitatif	Penanganan kemiskinan di Surabaya bisa berjalan ampuh apabila memakai kebijakan terintegrasi. Masing –masing lembaga di Surabaya mendesain kebijakan menanggulangi kemiskinan yang mempunyai keterlibatan& pengarahan bersama lembaga lain.	Erna mengungkapkan bahwa kebijakan yang dibentuk wajib dicocokkan, menggunakan skala kebutuhan masyarakat. Letak peneliti pada riset ini yaitu pada konsep Matland yaitu Kesesuaian Implementor.

No	Peneliti/Judul	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Posisi Peneliti
5.	Eva Banowati, 2014. Judul "Pengentasan Kemiskinan Penduduk Perkotaan melalui Pelatihan Pengolahan Sampah".	<p>Tujuan penelitian ini membuat model pengentasan kemiskinan penduduk perkotaan, melalui pelatihan mengolah sampah menjadi kompos sebagai material fungsional baru untuk meningkatkan pendapatan.</p> <p>Penelitian dilakukan menggunakan metode survai dan digabungkan, dengan penelitian tindakan (<i>action research</i>) terfokus pada pemecahan masalah aktual.</p>	Sifat simpel di kegiatan mengolah sampah diharapkan, dapat membangun sifat optimis sebagai peluang usaha yang dapat dilakukan penduduk miskin mengentaskan diri, dan anggota keluarganya dari status miskin yang disandangnya.	<p>Penelitian oleh Eva Banowati menggunakan Model Pelatihan deduktif yang bersifat melengkapi Model yang dikembangkan oleh (Genci, 1966).</p> <p>Dipengaruhi oleh kondisi subyek yang dilatih belum melembaga dengan metode pelatihan langsung kerja (<i>on the Job Training</i>). Sedangkan Posisi peneliti dalam penelitian ini terletak pada penggunaan teori dari Matland yakni Ketepatan Pelaksanaan Implementor.</p>

Melihat penelitian terdahulu pada tabel diatas, Buyung Adi Dharma, Sumartono, Sarwono, memaparkan tentang pelaksanaan program penanganan kemiskinan dengan KURMIKRO PT.BRI, alasan riset ini berupa hadirnya permasalahan kemiskinan di Indonesia, perlu solusi dari pemerintah agar cepat ditangani. Perpres No. 15 Tahun 2010, mengenai penyegeeraan ditanggulangnya kemiskinan jadi program yang spesifik, mengelola mengenai penyegeeraan pengatasan kemiskinan, termasuk mengenai keputusan penyampaian KUR, oleh stakeholder usaha di Indonesia. Riset ini sebagai penelitian spesifik pada PT. BRI Unit Soekarno-Hatta Kota Malang.

Dalam bidang lain, Romauly Ferbiana Silitonga memaparkan pelaksanaan program pemerintah daerah Bekasi guna menangani kemiskinan warga. Temuan riset memperlihatkan, implementasi program penanganan kemiskinan di Kabupaten Bekasi, dipaparkan pada beberapa variasi program yang dilakukan pada tingkatan OPD yang terlibat, peneliti mengintisarikan bahwa kebijakan utama yang dinilai mempunyai kontribusi tinggi yakni: kebijakan pembangunan Rutilahu & kebijakan peningkatan kualitas masyarakat pada KUM.

Riset yang dijalankan Nadia Herwina memaparkan, analisis implementasi keputusan pemerintah wilayah Tanjungpinang untuk menanggulangi kemiskinan. Hasil penelitian ditemukan bahwa, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam menanggulangi kemiskinan telah berlangsung dengan bagus, meskipun terdapat rintangan terkait implementasi di dunia nyata. Persoalan ini bisa ditunjukkan, seluruhnya balik dari input warga, kesesuaian bagi pelaksanaan di dunia nyata, relasi yang ada antar oknum sangat berdampak,

bagi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Tanjungpinang, jika bentuk relasi yang berlangsung antar oknum kurang baik bisa berdampak bagi kesuksesan program penanganan kemiskinan pada daerah Tanjungpinang.

Riset Erna Setijaningrum memaparkan, implementasi kebijakan terintegrasi pada penanganan kemiskinan oleh pemerintah daerah Surabaya. Riset menampilkan kebijakan menanggulangi kemiskinan di daerah Surabaya, bisa tepat terjadi jika memakai kebijakan terintegrasi. Masing-masing lembaga di daerah Surabaya, mendesain kebijakan penanganan kemiskinan yang mempunyai relasi & pengarahannya pada lembaga lain. Kebijakan itu juga wajib diseleraskan bersama skala kewajiban golongan prasejahtera guna dapat hidup nyaman pada daerah kota.

Eva Banowati memaparkan, penanganan kemiskinan warga di daerah kotamelalui edukasi pengelolaan sampah. Riset ini memperlihatkan pada latihan & internship pengolahan sampah, harus diteruskan jadi latihan rutin yang dilaksanakan oleh pengembangan masyarakat kerjasama dengan Ciptakarya & aspek PTN. Negara wajib menyumbangkan minat bagi pengarahannya, untuk implementasi terhadap satu target program penanganan kemiskinan yang terpadu bagi penambahan kemakmuran warga miskin agar tidak miskin.

Berdasarkan jurnal penelitian terdahulu, yang membedakan penelitian ini dengan jurnal-jurnal yang ada sebelumnya yakni pada jurnal pertama, melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pemberian kredit usaha rakyat. Jurnal kedua penelitian dalam pengentasan kemiskinan lebih berfokus pada, andil yang cukup besar dalam program pemberdayaan kelompok usaha mandiri. Jurnal ketiga penanggulangan kemiskinan lebih fokus, pada hubungan aktor yang terlibat. Jurnal keempat penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan, program yang telah dirancang oleh instansi terkait dengan instansi lain sesuai koordinasi yang telah dibuat. Jurnal kelima pelaksanaan pengentasan kemiskinan, melalui adanya pelatihan pengolahan sampah menjadi kompos sebagai material fungsional baru. Perbedaan disini peneliti akan melihat penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang melalui program Gerbang Hebat, yang melihat bagaimana pelaksanaan mengenai program tersebut pada Kampung tematik batik di Rejomulyo, Semarang.

1.6.2. Administrasi Publik

Para ahli administrasi publik berusaha, untuk memberikan definisi yang tepat mengenai Administrasi Publik, namun karena luasnya makna dari Administrasi Publik, maka tidak ada definisi yang benar-benar tepat menggambarkan makna dari Administrasi Publik. Definisi mengenai Administrasi Publik dikemukakan oleh Pfiffner dan Presthus (Syafiie, 2006), yang mendefinisikan Administrasi Publik adalah pelaksanaan kebijakan publik yang sudah diputuskan oleh organisasi perwakilan politik. Administrasi publik juga bisa dimaknai sebagai koordinasi upaya perorangan & kelompok guna pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Hal itu termasuk pekerjaan pemerintah yang sehari-hari dilakukan. Secara komprehensif, Administrasi Publik adalah suatu proses yang bersangkutan pada pelaksanaan kebijakan publik, pengarahan ketrampilan & teknik yang tak terhingga jumlahnya, mengarahkan tujuan pada upaya sebagian orang. Menurut Felix A Nigro dan Lloyd G.Nigro (Syafiie, 2006), memberikan definisi mengenai Administrasi Publik yaitu: a) Suatu kerja sama kelompok pada lingkup pemerintahan, b) Terdiri atas 3 cabang eksekutif, legislatif & yudikatif dan ikatan di dalamnya, c) Memiliki kontribusi penting bagi rumusan kebijakan publik & merupakan bagian dari proses politik, d) Erat berhubungan oleh berbagai jenis sektor swasta & individu untuk memberikan pelayanan publik.

Administrasi Publik pada sebagian bidang berbeda pada peletakan definisi dengan administrasi perseorangan. Sementara itu, Prajudi Atmosudirdjo (1982) menyatakan, bahwa Administrasi Publik merupakan administrasi dari negara sebagai lembaga & urusan yang mengupayakan tercapainya tujuan kenegaran.

Secara khusus, administrasi publik mempunyai empat institusi atau lembaga strategis. Pertama, kebijakan yang merupakan tugas pokok dari setiap organisasi publik-fungsi. Kedua, organisasi-organisasi publik, yang menyelenggarakan fungsi-fungsi administrasi publik-perangkat (keras). Ketiga, lembaga yang mempersiapkan para administrasi publik penyuplai nilai dan kompetensi. Keempat, lembaga sistem atau mekanisme administrasi publik yang merupakan piranti lunak dari organisasi publik proses.

Beberapa pendapat dari para ahli tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan, pengertian Administrasi Publik adalah proses yang didalamnya terdapat sumber daya manusia baik pemerintah, aktor lain terkait yang terorganisir dan terkoordinasi dalam menentukan suatu keputusan kebijakan publik untuk di implementasikan, didalam kehidupan masyarakat yang dilakukan secara professional, akuntabel, dan transparan. Perkembangan Administrasi Publik selalu mengalami perubahan pandangan mengikuti zaman, maka terjadilah pergeseran paradigma yang dikemukakan oleh beberapa ahli, peneliti mengambil pergeseran paradigma, menurut Nicholas Henry yang akan dijelaskan pada pemaparan selanjutnya.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Adanya 5 perpindahan paradigma oleh Nicholas Henry (Syafiie Ilmu Administrasi Publik, 2006:27), antara lain:

1. Paradigma I

Akibat yang muncul melalui paradigma ini, bahwa administrasi wajib ditinjau untuk persoalan yang *value free* & ditunjukkan, pada pencapaian efisiensi & ekonomi pada *government bureaucracy*.

2. Paradigma II

Prinsip pada paradigam ini terdiri dari POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting*), yang bisa diimplementasikan dengan baik.

3. Paradigma III

Melalui paradigma ini ada dua asumsi jika administrasi publik, mustahil dihilangkan dari politik, sementara asumsi lain menyatakan bahwa Administrasi Publik bisa terjadi dimanapun.

4. Paradigma IV

Perbuatan organisasi, analisis manajemen, implementasi teknologi maju contohnya kuantitatif, analisis sistem, penelitian operasi & seterusnya adalah tujuan dari paradigma IV.

5. Paradigma V

Paradigma ini sudah mempunyai tujuan & tempat yang pasti. Tujuan Administrasi Publik pada paradigma ini yaitu teori organisasi, pengaturan & kebijakan umum. Tempatnya yaitu persoalan & *interest* umum.

6. Paradigma VI

Ilmu administrasi publik memakai administrasi bisnis guna pemberian pelayanan terhadap rakyat. Denhart (2003) menyatakan konsep bisnis pada cakupan umum maka NPM jadi NPS.

Penelitian ini, peneliti berfokus dalam paradigma kelima yakni kebijakan publik dari paradigma administrasi publik, yang dimana merupakan administrasi publik sebagai administrasi publik, yang lebih fokus terhadap kepentingan publik, kebijakan publik yang dibuat, serta teori organisasi publik yang tersedia dalam sektor publik. Peneliti mengambil kebijakan publik dalam paradigma kelima, karena paradigma tersebut sudah mampu disesuaikan, dengan situasi kondisi pada kepentingan publik yang dilakukan oleh suatu organisasi Pemerintah, akan dijelaskan definisi kebijakan publik dalam pemaparan selanjutnya.

1.6.4. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R.Dye (1981), kebijakan publik merupakan segala upaya yang dilaksanakan pemerintah, apakah melakukan upaya itu atau tidak melaksanakan (membiarkan) hal itu terjadi.

Menurut RC. Chandler dan JC.Plano (1988), kebijakan umum merupakan penggunaan sumber daya untuk menyelesaikan masalah publik. Menurut Willy N.Dunn (Syafiie, 2006), kebijakan umum merupakan suatu rentetan keputusan yang saling berkaitan dibentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, terhadap semua bidang yang berkaitan dengan tugas pemerintah, contohnya energi, pertahanan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sementara itu, analisis kebijakan publik merupakan tindakan yang memberikan pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan.

Menurut William N Dunn (Pengantar Analisis Kebijakan Publik. 2003:24), tahapan dalam kebijakan publik terdiri dari :

A. Tahap Pembuatan Agenda

Melalui tahapan ini, pejabat terpilih atau stakeholder terkait kebijakan dipilih dan diangkat untuk menempatkan masalah kebijakan pada agenda kebijakan. Sebagian masalah akan masuk, ke dalam agenda kebijakan saat merumuskan kebijakan. Tahapan ini akan menentukan masalah apa yang akan menjadi fokus pembahasan.

B. Tahap Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini masalah yang tidak masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian ditulis oleh pengambil kebijakan. Masalah yang telah didefinisikan lalu diberi solusi. Solusi berasal dari beberapa alternative pilihan yang ada. Melalui perumusan kebijakan, setiap alternatif berlomba untuk dipilih sebagai kebijakan yang akan diberikan solusinya. Pada tahapan ini, setiap stakeholder saling bersaing untuk memberikan solusi dianggap paling baik.

C. Tahap Pengambilan Kebijakan

Berdasarkan beberapa pilihan kebijakan yang diberikan perumus kebijakan. Sebagian analisis & perkiraan akan dilakukan, untuk memperoleh alternatif kebijakan sehingga akhirnya terpilih kebijakan yang akan diambil melalui dukungan sebagian besar legislatif, kesepakatan dengan pimpinan lembaga atau keputusan peradilan.

D. Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan jika tidak diimplementasikan maka kebijakan tersebut tidak bermakna. Kebijakan terpilih harus dilakukan oleh bidang administrasi, untuk menyalurkan sumber daya keuangan & manusia. Melalui tahap ini, semua keperluan stakeholder akan saling berlomba.

E. Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahapan ini akan menilai atau mengevaluasi pelaksanaan suatu program kebijakan, untuk mengetahui sejauh mana akibat kebijakan yang dibentuk untuk hasil ditargetkan.

Kesimpulan dari peneliti mengenai kebijakan publik, adalah bahwa kebijakan publik merupakan suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan pemerintah, dalam menentukan dan memecahkan suatu masalah publik yang hasil keputusannya, akan memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Beberapa tahap dalam kebijakan publik diatas, yang menjadi fokus utama dalam pembahasan ini adalah implementasi kebijakan, karena implementasi kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik yang paling penting bagi Pemerintah, dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi sebuah keputusan kebijakan publik. Berikut akan dijelaskan pengertian dari implementasi kebijakan.

1.6.5. Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (Herabudin, 2016), menjelaskan implementasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan aparatur negara, sektor pemerintah dan swasta yang ditunjukkan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan oleh kebijakan publik.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Solihin Abdul Wahab, 2012:65) menyatakan bahwa, inti dari implementasi adalah mengerti yang terjadi setelah program dijalankan & dirumuskan.

Gordon (Pujiastuti, 2019:32), mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Seorang administrator harus mampu mengatur cara untuk mengelola, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah disetujui. Sementara menurut Joko Widodo (2010), mendefinisikan implementasi merupakan proses yang berhubungan dengan berbagai sumber diantaranya SDM, uang dan ketrampilan organisasional yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta. Sehingga secara sederhana implementasi kebijakan dapat disimpulkan, sebagai tindakan dalam melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk meraih tujuan kebijakan.

Menurut Ripley & Franklin (1986), syarat penentuan berhasilnya implementasi kebijakan terdiri atas 3 hal yakni: ketaatan birokrasi terhadap birokrasi yang lebih tinggi sesuai regulasi yang berlaku, terdapat kemudahan rutinitas dan hilangnya masalah, pelaksanaan dan akibat yang diinginkan berdasarkan program yang sudah direncanakan.

Sementara menurut Quade (1984), menjelaskan terdapat 4 hal yang semestinya diamati pada analisis implementasi kebijakan publik, yakni :

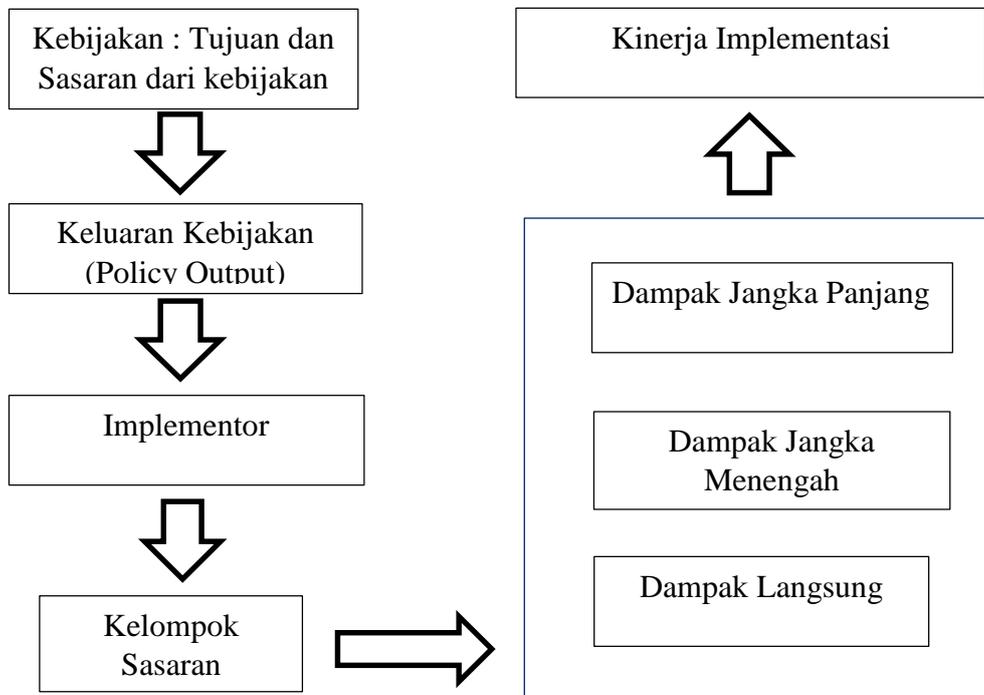
1. Kebijakan yang diinginkan yaitu bentuk hubungan yang diinginkan supaya pihak yang mengesahkan kebijakan berupaya mencapainya.

2. Kelompok sasaran yaitu pelaku yang dinilai mampu mengambil bentuk hubungan baru dengan kebijakan & pelaku yang semestinya berubah guna mencukupi kebutuhan.
3. Organisasi pelaksana yaitu satuan birokrasi publik yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan
4. Faktor lingkungan yaitu pengaruh lingkungan yang menentukan hasil implementasi kebijakan.

Pendapat beberapa ahli mengenai pengertian implementasi kebijakan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian implementasi kebijakan dalam penelitian ini, merupakan suatu rangkaian dalam kebijakan publik yang mencakup, suatu tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah atau implementor, (tindakan dalam pengertian ini mengandung makna, bahwa pemerintah menjalin kerjasama dengan pihak luar atau *stakeholder* yang terkait, dengan program bersama juga dengan mengajak masyarakat setempat untuk ikut andil dalam pelaksanaan), guna mencapai suatu tujuan dengan mempertimbangkan dampak baik dan buruk bagi masyarakat, karena kinerja yang akan dicapai dalam suatu implementasi kebijakan, juga merupakan suatu penilaian mengenai standar dan sasaran tujuan yang akan dicapai. Penjelasan mengenai bagaimana proses dari implementasi, menurut Erwan Agus Purwanto dalam bukunya “Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia”.

Gambar 1. 2.

Proses Implementasi Kebijakan



Sumber : Purwanto, Erwan Agus. 2015

Proses implementasi menurut Erwan, dijelaskan untuk dapat mengidentifikasi secara detail, mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kegagalan dan keberhasilan suatu kebijakan, maka para implementor selaku yang terlibat dalam kebijakan tersebut, selalu berupaya untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan yang telah dibuat. Semua kebijakan yang telah dibuat pada dasarnya, diformulasikan dengan misi untuk mencapai tujuan dan juga sasaran yang telah ditentukan, namun untuk mencapai tujuan tersebut maka membutuhkan masukan-masukan kebijakan.

Masukan yang telah dibicarakan akan menjadi sebuah keluaran kebijakan yang dapat dijadikan instrumen, dalam mewujudkan kebijakan yang telah

ditetapkan. Pada saat melakukan implementasi suatu kebijakan, pemerintah secara bersama-sama dengan sektor swasta dan pihak terkait, melakukan misi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Keluaran tersebut sebelum disampaikan kepada masyarakat atau kelompok sasaran, sudah perlu mendapatkan informasi mengenai visi misi dari kebijakan tersebut, agar kelompok sasaran menjadi ikut terlibat secara aktif dalam implementasi kebijakan tersebut. Keterlibatan tersebut secara tidak langsung masyarakat akan mampu meningkatkan kepercayaan, hal tersebut akan mempermudah mendapatkan dukungan saat suatu kebijakan dilaksanakan.

Dukungan yang baik dari kelompok sasaran tersebut, implementasi kebijakan suatu program akan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal, dalam pelaksanaannya juga terdapat dampak yang akan diterima baik, hal itu merupakan dampak secara langsung, maupun dampak dengan tahap menengah dan jangka panjang. Adanya proses semua itu, dapat dilihat bagaimana kinerja dari implementasi suatu kebijakan yang telah dibuat, sudah akan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau masih harus dilakukan evaluasi bersama oleh implementor.

1.6.6. Program Gerbang Hebat

Gerbang Hebat merupakan : GERakan Bersama PenanggulAngan KemiskinaN dan PenGangguan melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem dan Etos Bersama MasyarakAT. Mempunyai arti, dengan hadirnya gerakan bersama dengan pemerintah, diharapkan persoalan di Semarang, misalnya mengatasi kemiskinan & pengangguran bisa terwujud melalui beberapa jenis kebijakan yang bisa dibentuk

oleh pemerintah & *stakeholder* lain yang berkaitan, melalui hadirnya kontribusi rakyat yang urgent untuk menjalankan kebijakan ini.

Gerbang Hebat juga hadir pada Kebijakan Kampung Tematik yaitu Kampung Batik. Kebijakan ini adalah kreasi baru oleh Pemerintah Semarang guna, menjalankan kebijakan peningkatan pengentasan kemiskinan. Kebijakan ini diurus oleh Bappeda Semarang lebih detailnya pada sub bidang sosial budaya.

Pemerintah Kota Semarang sudah mendistribusikan RAB senilai 200 juta untuk masing-masing kampung, dengan (APBD) yang diputuskan ketika (Musrenbang) Semarang yang dilaksanakan rakyat & pemerintah. Biaya kampung itu juga dibantu dengan biaya oleh fasilitasi uang Musrenbang, pada masing-masing kecamatan & biaya oleh OPD yang terlibat pada masing-masing kampung.

1.6.7. Implementasi Program

Kebijakan publik adalah usaha yang dilaksanakan negara ketika memilih & mengatasi sebuah urusan masyarakat yang mempunyai dampak bagi rakyat. Berbagai langkah bagi kebijakan pemerintah, dapat menghasilkan tujuan penting bagi kajian ini merupakan pelaksanaan kebijakan, disebabkan pelaksanaan program adalah tujuan dari kebijakan pemerintah yang sangat berperan pada negara guna melakukan sesuatu hasil kebijakan pemerintah.

Implementasi kebijakan yakni sebuah untaian kebijakan publik, yang meliputi sebuah perilaku yang diputuskan & dilakukan negara & pelaksana, perilaku, pada definisi ini berarti jika negara melaksanakan kerjasama pada pemangku kepentingan luar berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Richard Matland (Yulianto Kadji, 2015: 77-79), mempunyai empat prinsip wajib yang harus ada pada keefektifan pelaksana kebijakan antaralain:

1. Ketepatan Kebijakan

- a. Bagaimana kebijakan hadir bermuatan aspek dalam pemecahan urusan
- b. Apa program itu telah direncanakan tepat sesuai ciri urusan yang dimaksud terselesaikan;
- c. Apa kebijakan dibentuk instansi yang memiliki otoritas bertepatan dengan ketepatan kebijakan

2. Ketepatan Pelaksanaan

Pelaksana kebijakan bukan saja pemerintah. Ada 3 instansi yang bisa terjadi pada implementor kebijakan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat.

3. Ketepatan Sasaran

- a. Apa sasaran yang dipengaruhi cocok dengan yang didesain
- b. Apa sasaran ada pada situasi tepat guna dipengaruhi / tidak.
- c. Apa pengaruh pelaksanaan kebijakan berkarakter baru / diperbarui pelaksanaan program.

4. Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan eksternal.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil model dari Matland yang lebih berfokus pada Ketepatan Pelaksanaan Implementor, disebabkan prinsip ini program bukan saja pemerintah. Terdapat 3 instansi yang bisa jadi implementor program yaitu negara, swasta dan warga. Ketepatan Kebijakan, karena akan dilihat

kesesuaian dari adanya program tersebut, dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Ketepatan target, akan dilihat apakah target sudah sesuai dan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih terhadap kebijakan lain.

1.7. Fenomena Penelitian

Kajian riset bermuatan mengenai bidang-bidang, yang berelasi terkait masalah yang bisa dicari & didapatkan *researcher*, untuk mendeskripsikan kenyataan yang sejatinya pada persoalan yang bisa dikaji. Fenomena diobservasi yaitu memfokuskan pada implementasi sebagai hasil. Penelitian implementasi ini, berusaha menggambarkan hasil dari implementasi program Gerbang Hebat, dalam pengentasan kemiskinan yang lokusnya di Kampung Batik, Rejomulyo Semarang. Kemampuan program dalam mengurangi permasalahan tingginya angka kemiskinan di Kampung Batik tersebut, serta partisipasi masyarakat akan adanya pelaksanaan program. Fenomena yang akan diamati mengacu pada teori yang diprakarsai oleh Richard Matland :

Peneliti hanya menggunakan tiga ketepatan dari Richard Matland, karena dari ketiga ketepatan tersebutlah yang paling sesuai, jika diterapkan saat turun lapangan, karena peneliti akan melihat bagaimana ketepatan program Gerbang Hebat sebagai usaha pemerintah daerah, untuk menurunkan angka kemiskinan dan pada program tersebut ada program Kampung Tematik, sebagai inovasi dari Pemkot Semarang untuk melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan. Melihat ketepatan pelaksanaan dari berbagai *stakeholder*, serta masyarakat yang terkait dengan program tersebut.

Tabel 1. 3

Fenomena Penelitian

Objek Pengamatan	Indikator	Fenomena yang diamati
Implementasi Program	1. Ketepatan Kebijakan	a. Ketepatan kebijakan Program Gerbang Hebat yang merupakan upaya dalam pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang.
	2. Ketepatan Implementor	a. Peran pemerintah Kota Semarang bersama dengan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan program gerbang hebat sebagai upaya pengentasan kemiskinan b. Koordinasi beberapa pihak yang terlibat, karena dalam penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan dukungan dan peran serta seluruh perangkat yang terlibat.
	3. Ketepatan Target	a. Kesiapan masyarakat untuk menerima dan berpartisipasi terhadap program Gerbang Hebat b. Apakah target dari program Gerbang Hebat sudah tercapai sesuai dengan tujuan awal

1.8. Metode Penelitian

Riset ini menggunakan desain kualitatif. Riset kualitatif merupakan riset yang berniat guna mengetahui kajian mengenai hal yang terjadi secara menyeluruh melalui penggambaran berupa kalimat dan frasa (Moleong, 2016: 6).

1.8.1. Desain Penelitian

Desain Penelitian merupakan suatu penggambaran mengenai cara menyatukan & mengatur data supaya riset yang diinginkan bisa terwujud (Wiratna, 2014: 26). Peneliti dalam penelitian ini menggunakan riset kualitatif yang berkarakter deskriptif.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian yakni lokus / tempat dimana akan dilakukan penelitian. Peneliti memilih lokasi penelitian, adalah pada Kampung Tematik (Kampung Batik Rejomulyo) Kota Semarang, Jawa Tengah yang bekerjasama dengan seluruh masyarakat Kota Semarang dan stakeholder terkait. Lokasi digunakan sebab sesuai cirri yang diputuskan pada riset.

1.8.3. Subjek Penelitian

Teknik *sampling snowball* (Dewi Sartika, 2016:189), yaitu cara pengambilan sampel dengan proses bergilir antar narasumber lainnya, umumnya cara ini dipakai guna memaparkan bentuk-bentuk sosial & komunikasi (sosiometrik) pada kelompok khusus. Subyek riset terbagi jadi dua antarlain:

1. Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari subyek riset.

2. Data Sekunder merupakan data yang didapatkan melalui kajian pustaka dan sumber.

1.8.4. Jenis Data

Penelitian kualitatif fenomenologi, dikenal beberapa jenis teknik analisis yang meliputi analisis domain, taksonomi, komponensial, tema kultural & perbandingan tetap. Beberapa jenis teknik analisis tersebut, peneliti menggunakan teknik penelitian analisis domain. Analisis Domain dalam penjelasan (Sugiyono, 2012:256), dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian.

1.8.5. Sumber Data

1. Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari subyek riset.
2. Data Sekunder merupakan data yang didapatkan melalui kajian pustaka dan sumber.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah alat untuk membuktikan informasi & keterangan yang telah didapatkan sebelumnya. Teknik wawancara pada penelitian ini merupakan wawancara mendalam. Dimana wawancara mendalam (*in-depth interview*), merupakan langkah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan penelitian melalui tanya jawab disertai tatap muka, antara pewawancara dengan informan baik menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak, dimana orang yang

mewawancarai & informan terlibat pada kehidupan sosial relatif lama (Nuning, 2017:212).

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan dalam penelitian, dengan mempelajari dokumen - dokumen yang terkait dengan penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya - karya. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan, peraturan, *legal drafting*. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, bagan dan lain sebagainya. Studi dokumentasi ini, adalah studi penyempurna dari pengamatan & wawancara, dalam teknik dokumentasi ini, peneliti akan menggunakan dokumen berupa catatan, rekaman audio, dan foto dari informan.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Melalui pengumpulan data peneliti akan mengolah semua data yang ada. Data dianalisis memakai metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menggambarkan secara komprehensif data yang diperoleh pada proses penelitian. Pengolahan data kualitatif melalui analisis data di lokasi. Melalui model Miles & Huberman (Sugiyono, 2016: 246) sebagai berikut:

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi bermakna meringkas, menentukan poin-poin utama & penting untuk dicari topik & bentuknya. Tahap ini peneliti akan menentukan informasi, yang relevan & tidak relevan terkait penelitian. Melalui tahap reduksi data akan mengecil, semakin sedikit serta mengarah pada poin permasalahan sehingga dapat menghasilkan penggambaran jelas terkait obyek penelitian & mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya.

b) Penyajian Data

Langkah berikutnya adalah mendisplaykan atau menampilkan data. Data ditampilkan pada bentuk tabel & narasi penjelasan secara deskriptif.

c) Penarikan Kesimpulan

Langkah berikutnya pada analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016:252), adalah pengambilan simpulan, setelah seluruh data ditampilkakan inti masalah sebagai obyek penelitian bisa dimengerti & maka diambilah kesimpulan yang menjadi hasil penelitian.

1.8.8. Kualitas Data

Riset ini memakai triangulasi sumber yang bermakna perbandingan & mengevaluasi lagi tingkat validitas data, yang didapatkan dengan waktu & peralatan masing-masing pada riset kualitatif.